

**RANCANGAN CASCADING KINERJA ESSELON II SAMPAI DENGAN ESSELON IV
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. HSS
TAHUN 2019**

ES II											
No	Isu Strategis	Permasalahan	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target (Tahun 2023)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Kondisi Awal (Tahun 2018)	Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2020)
1	2		3	4	5	8		12	10	11	12
1	Masih rendahnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis, dengan permasalahan (1) Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah	2. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/ Predikat AKIP	89,06 (A)	2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat	B	81,30 (A)	82,55 (A)
2	Adanya persepsi publik ASN belum profesional, dimana ASN profesional merupakan kebutuhan organisasi dan tuntutan kompetensi global	Belum ada standar/ukuran ASN yang profesional	1. Mewujudkan ASN yang profesional melalui penerapan sistem Merit	Indeks profesionalisme ASN	81,33	1. Terwujudnya ASN yang Profesional melalui Penerapan Sistem Merit	Indeks Profesionalisme ASN	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ Keterangan : IP _i = Indeks Profesionalisme ke-i IP ₁ - Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP ₂ - Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP ₃ - Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP ₄ - Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin	48,63	58	73,17

RANCANGAN CASCADING KINERJA ESSELON III SAMPAI DENGAN ESSELON IV
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. HSS
TAHUN 2020

ES III						ES IV						
Program	Anggaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan	Target (Tahun 2020)	Program	Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan	Penjelasan	Indikator Kinerja	Target (Tahun 2020)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	166,398,150	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Seluruh aspek pelayanan yang dilaksanakan dibagi dengan seluruh aspek pelayanan dikali 100%	100	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	166,398,150	Terlaksannya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun
	135,020,000						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	135,020,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun
	16,460,000						Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	16,460,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun
	24,787,500						Penyediaan makanan dan minuman	24,787,500			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun
	99,270,000						Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Lainnya	99,270,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun
	350,000,990						Rapat-rapat koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	350,000,990			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	-	Terlaksannya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian		Gedung kantor kondisi baik	1 tahun
	-						Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	-			Gedung kantor kondisi baik	1 tahun
	102,321,750						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102,321,750			Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	1 tahun
	25,800,000						Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,800,000			Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	1 tahun

ES III						ES IV						
Program	Anggaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan	Target (Tahun 2020)	Program	Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan	Penjelasan	Indikator Kinerja	Target (Tahun 2020)
	29,000,000						Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas	29,000,000			Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	1 tahun
Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	1,669,900,000					Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1,669,900,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000	Meningkatnya pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Hasil Reviu AKIP	82,55	Peningkatan Perencanaa, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen AKIP	5,000,000	Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas		Dokumen AKIP memenuhi aspek Kualitas	15 laporan capian kinerja
	5,000,000	Keuangan Daerah	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah	Hasil review Laporan Keuangan Daerah			Penyusunan Dokumen Keuangan	5,000,000	Terpenuhinya dokumen Keuangan Daerah dari aspek kualitas		Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 laporan keuangan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	264,999,800	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jabatannya masing-masing	Persentase JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) yg melakukan kebijakan promosi terbuka untuk JPT sesuai dengan undang-undang ASN	Jumlah pejabat administrator yang mengikuti promosi terbuka dibagi jumlah jabatan pimpinan tinggi x 100%	18,75 % $\frac{6}{32} \times 100$	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	264,999,800		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang lowong sebanyak 5 jabatan dan akan diisi melalui lelang terbuka karena pejabatnya pensiun, setiap jabatan pimpinan tinggi minimal diikuti 3 (tiga) orang pejabat administrator, jumlah jabatan tinggi seluruhnya ada 32 jabatan	Jumlah jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi jabatan struktural	2 jabatan
	1,787,000,000		Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial dibagi dengan jumlah jabatan struktural yang terisi x 100%	67,67 % $\frac{340+36+10+20}{600} \times 100$		Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan	1,787,000,000	Terlaksananya Diklat Manajerial	Pejabat pengawas direncanakan untuk Diklatpim tk. II 7 orang, Diklatpim III 20 orang dan Diklatpim tk. IV sebanyak 10 orang dan dilaksanakan dengan pola penyertaan (pengiriman) ke BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi 23 orang, jumlah jabatan administrator yang terisi 133 orang dan jabatan pengawas yang terisi sebanyak 413 orang	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklatpim tk.II, tk.III dan tk. IV	37 orang

ES III						ES IV						
Program	Anggaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan	Target (Tahun 2020)	Program	Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan	Penjelasan	Indikator Kinerja	Target (Tahun 2020)
	438,160,000		Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis (diklat teknis tugas dan fungsi + diklat fungsional tertentu) dibagi dengan jumlah JFT (Jabatan Fungsional Terstentu) x 100%	46,78% $\frac{1.127+46+40+90}{2.785} \times 100$		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepala Sekolah	438,160,000	Terlaksananya Diklat Jabtan Fungsional Kepala Sekolah	Calon kepala sekolah direncanakan mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah sebanyak 60 orang dilaksanakan dengan pola kerjasama antara Pemkab HSS dengan LP2 KS Solo dan LPMP Banjarbaru	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Diklat Kepala Sekolah	60 orang
	2,253,795,000						Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	2,253,795,000	Terlaksananya Diklat Teknis Prajabatan bagi CPNS	Direncanakan Diklat Prajabatan untuk CPNS sebanyak 201 orang dengan rincian 160 orang dengan pola kemitraan dengan BPSDMD dan 41 orang dengan pola penyertaan (pengiriman) ke BPSDM Prov. Kalsel di Banjarbaru sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai PNS	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	201 orang
Pembinaan Disiplin Aparatur	116,987,800	Meningkatnya tata kelola kepegawaian	Persentase tingkat penurunan pelanggaran disiplin PNS	Jumlah Kasus Tahun Lalu (n-1) - Jumlah Kasus Tahun ini (n) dibagi Jumlah Kasus Tahun Lalu (n-1) x 100	20%	Pembinaan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan Evaluasi dan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Kepegawaian	116,987,800	Tertanganinya laporan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Pembinaan disiplin PNS merupakan upaya pembentukan sikap dan perilaku PNS dalam bekerja, agar dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi	Jumlah laporan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	5 laporan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kpegawain	541,826,900		Persentase formasi jabatan pelaksana yang terisi sesuai kompetensi dan kualifikasi	Jumlah formasi jabatan pelaksana yang terisi seauai kompetensi dan kualifikasi dibagi jumlah formasi jabatan pelaksana x 100	93% $\frac{1.525}{1.641} \times 100$	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kpegawain	Seleksi Penerimaan Calon ASN	541,826,900	Terlaksananya Penerimaan Calon ASN	Pembinaan PNS dimulai dari perencanaan, pengadaan sampai penempatan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan, agar PNS mampu mengembangkan kapasitas, kapabilitas, dan karirnya secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi	Persentase formasi yang diisi sesuai dengan kompetensi	100%

ES III						ES IV						
Program	Anggaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan	Target (Tahun 2020)	Program	Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan	Penjelasan	Indikator Kinerja	Target (Tahun 2020)
	59,000,000		Persentase Database PNS pada SAPK dan SIMPEG yang Update	Jumlah Data Base PNS pada SAPK dan SIMPEG yang Update dibagi jumlah PNS x 100	92% $\frac{4.119}{4.475} \times 100$		Penyusunan Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat	59,000,000	Terlaksannnya penyusunan dokumen usulan kenaikan pangkat	Kenaikan pangkat PNS adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian yang bersangkutan terhadap negara. Oleh sebab itu perlu dilakukan koordinasi yang baik dengan BKN Regional VIII agar SK Kenaikan Pangkat dapat diterima PNS tepat waktu	Jumlah dokumen usulan kenaikan pangkat	2 dokumen
	22,567,500						Penyusunan Buku Nominatif Pegawai	22,567,500	Terlaksananya penyusunan buku nominatif pegawai	Tersedianya data nominatif PNS secara lengkap, baik dan akurat diharapkan dapat menunjang kecepatan dan kemudahan pihak-pihak yang memerlukan data-data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kab. HSS	Jumlah buku nominatif pegawai	18 buku

Kendangan, Januari 2020
Kepala BKD, Diklat,

ZULKIPLI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710711 199101 1 002